



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BERISKHAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **274130**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 775.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 8340 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 9804 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 8046 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 8343 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 10350 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 179.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA T G02T31L0 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	284.889.281
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.239.389.281
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.239.389.281

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.